

TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI NOTARIS PELAKU
PENGHELAPAN PAJAK JUAL BELI TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.)**



PRO PATRIA
Oleh:

**HENNY HARTATI
NIM : 12214052**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018**

TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI NOTARIS PELAKU
PENGHELAPAN PAJAK JUAL BELI TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.)**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya



Oleh: **PRO PATRIA**

**HENNY HARTATI
NIM : 12214052**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2018

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 7 Agustus 2018.

Oleh Dosen Pembimbing :


Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

PROPRRIA
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal *Agst 2018*

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal : Agustus . 2018

Oleh :
Dosen Pembimbing


(Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama


(Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.)

TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI NOTARIS PELAKU
PENGGELOMPOK PAJAK JUAL BELI TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.)**

Tesis Ini Telah Disahkan oleh Tim Penguji
Pada Tanggal: Agustus 2018

TIM PENGUJI TESIS :

Ketua : (1) Dr. SUWARDI, SH., MH.

Anggota : (2) Dr. A. A. ANDI PRAJITNO, Drs., SH., MKn.

: (3) Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : **HENNY HARTATI**
NIM : 12214052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan
Universitas : Narotama Surabaya
Judul Tesis : “PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI NOTARIS
PELAKU PENGGELAPAN PAJAK JUAL BELI TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.)”

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetatruan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar acuan/daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari di temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat atau sanksi akademis yang diberikan oleh yang berwenang atau Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan,



HENNY HARTATI
Nim: 12214052

RINGKASAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik oleh dan/atau di hadapan Notaris, didasarkan atas perintah Undang-Undang atau atas permintaan para pihak. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Pada awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Pada dekade belakangan ini, banyak oknum Notaris yang tersandung permasalahan hukum, baik permasalahan yang tidak disadari maupun yang disadari oleh oknum yang bersangkutan. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah penyalahgunaan kepercayaan dengan menggunakan uang pembayaran pajak jual-beli tanah yang dititipkan oleh klien kepada oknum Notaris yang bersangkutan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps. tertanggal 04 Agustus 2015, bahwa AS dinyatakan sebagai terdakwa tindak pidana penggelapan. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya, yaitu: (1) Apakah Notaris berkewajiban menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara; dan (2) Apakah sanksi pidana terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana penggelapan pajak jual beli tanah tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara; dan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana penggelapan pajak jual beli tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan demikian pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan hukum kenotariatan dan hukum pidana. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, selanjutnya diadakan klasifikasi bahan hukum terkait, sehingga diketahui asas-asas hukumnya.

Hasil penelitian ini yakni bahwa Notaris tidak berkewajiban untuk menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara (bank persepsi yang ditunjuk), karena di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai kewenangan seorang Notaris untuk membayarkan pajak jual beli tanah dari kliennya atau menghadap ke kas negara. Namun demikian, Notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa pembayaran pajak jual beli tanah yang terutang tersebut sudah dilunasi oleh Wajib Pajak dengan memperlihatkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB). Sanksi pidana terhadap oknum Notaris yang terlibat tindak pidana penggelapan pajak jual beli tanah, yakni dapat diterapkan terhadap oknum notaris selaku PPAT yang bersangkutan karena perbuatannya telah terbukti memenuhi rumusan delik Pasal pidana dalam Pasal 372 KUHP. Adapun alasan pemberat yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam kasus ini yakni bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Notaris tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembayaran untuk proses penerbitan sertifikat, hal ini bertolak belakang dengan peranan seorang Notaris yang seharusnya ikut serta dalam melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak yang terutang pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan cara hanya boleh menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan bangunan jika pajaknya sudah dibayar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) Hendaknya dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai kebijakan terkait pembayaran pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara itu di samping pembayaran yang dilakukan secara langsung ke kas negara (bank persepsi yang ditunjuk) juga dapat dilakukan dengan cara pembayaran setoran secara online, agar lebih memberikan kepraktisan dan rasa keamanan bagi penyetor/wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak jual beli tanah; (2) Kepada para Notaris selaku PPAT hendaknya agar memegang teguh serta melaksanakan sumpah/janji jabatan yang diucapkan sebelum memulai tugas dan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab hukum kepada Negara Republik Indonesia dan juga para pihak, sehingga lebih mengutamakan kehati-hatian dan menerapkan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Dengan demikian notaris yang bersangkutan akan terhindar dari permasalahan pidana terkait pajak jual beli tanah.

ABSTRACT

Accountability is an attitude or action to bear all the consequences of an action taken or an attitude to bear all the risks or consequences arising from an act. In the past decade, many Notary public have stumbled on legal issues, both unrecognized problems and those who are aware of them. One case that has happened is the misuse of trust by using the money paid for the sale and purchase of land deposited by the client to the Notary concerned, as in the Denpasar District Court Decision Number: 300/Pid.B/2015/PN.Dps. dated August 4, 2015, that the US was declared a defendant of embezzlement. Based on the above description, this study aims to analyze the authority of the Notary to receive and pay the land sale and purchase tax in the form of PPh and BPHTB to the state treasury; and regarding criminal sanctions against Notaries who are involved in the crime of buying and selling land tax evasion.

This research is a normative legal research, with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting and processing legal materials in this study through literature study, then the classification of related legal materials is held, so that the legal principles are known.

The results of this study are that the Notary is not obliged to accept and pay the land sale and purchase tax in the form of PPh and BPHTB to the state treasury (designated perception bank), because in the statutory regulations are not regulated on the authority of a Notary to pay sales tax land from his client or face to the state treasury. Whereas criminal sanctions against a notary who is involved in a crime of embezzlement of land sales tax, which can be applied to a notary as PPAT concerned because of his actions have been proven to fulfill the criminal Article offense in Article 372 of the Criminal Code. The reason for the ballast considered by the panel of judges in this case is that the Defendant's act as Notary did not fulfill his obligation to settle the payment for the process of issuing the certificate.

Keywords: Criminal Sanctions, Notaries, Embezzlement, and Land Sale and Purchase Tax.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Pada dekade belakangan ini, banyak oknum Notaris yang tersandung permasalahan hukum, baik permasalahan yang tidak disadari maupun yang disadari oleh oknum yang bersangkutan. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah penyalahgunaan kepercayaan dengan menggunakan uang pembayaran pajak jual-beli tanah yang dititipkan oleh klien kepada oknum Notaris yang bersangkutan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps. tertanggal 04 Agustus 2015, bahwa AS dinyatakan sebagai terdakwa tindak pidana penggelapan. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara; dan mengenai sanksi pidana terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana penggelapan pajak jual beli tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, selanjutnya diadakan klasifikasi bahan hukum terkait, sehingga diketahui asas-asas hukumnya.

Hasil penelitian ini yakni bahwa Notaris tidak berkewajiban untuk menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara (bank persepsi yang ditunjuk), karena di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai kewenangan seorang Notaris untuk membayarkan pajak jual beli tanah dari kliennya atau penghadap ke kas negara. Bahwa sanksi pidana terhadap oknum Notaris yang terlibat tindak pidana penggelapan pajak jual beli tanah, yakni dapat diterapkan terhadap oknum notaris selaku PPAT yang bersangkutan karena perbuatannya telah terbukti memenuhi rumusan delik Pasal pidana dalam Pasal 372 KUHP. Adapun alasan pemberat yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam kasus ini yakni perbuatan Terdakwa sebagai Notaris tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembayaran untuk proses penerbitan sertifikat.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Notaris, Penggelapan, dan Pajak Jual Beli Tanah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
3.1. Tujuan Penelitian	8
3.2. Manfaat Penelitian	8
3.2.1. Manfaat Teoritis	8
3.2.2. Manfaat Praktis	9
4. Originalitas Penelitian	9
5. Kajian Pustaka	11
5.1. Teori Sanksi	11
5.2. Teori Kewenangan	13
5.3. Teori tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	18
5.4. Teori Perpajakan	23
5.5. Konsep tentang Notaris	24
5.6. Konsep pajak Jual Beli Tanah.....	28
6. Metode Penelitian	29
6.1. Tipe Penelitian	29
6.2. Pendekatan Masalah.....	30

6.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).....	30
6.2.2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	30
6.2.3. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	30
6.3. Sumber Bahan Hukum	31
6.3.1. Bahan Hukum Primer.....	31
6.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	32
6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.	33
6.5. Analisis Bahan Hukum	33
7. Sistematika Penulisan.....	34
 BAB II KEWENANGAN NOTARIS MENERIMA DAN MEMBAYARKAN UANG PAJAK JUAL BELI TANAH YANG BERUPA PPH DAN BPHTB KE KAS NEGARA.....	35
1. Perbuatan Jual Beli Tanah Menurut Hukum	35
2. Kewenangan Notaris di Bidang Pertanahan	40
3. Pengaturan Mengenai Pelayanan Pembayaran PPh dan BPHTB oleh Notaris/PPAT Menurut Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku	45
3.1. Kewajiban Pembayaran PPh dan BPHTB	45
3.2. Pelayanan Pembayaran Pajak Sebagai Kebiasaan Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya.....	46
3.3. Pembayaran PPh yang Dilakukan oleh Notaris	52
3.4. Pembayaran BPHTB yang Dilakukan oleh Notaris.....	61
3.5. Pelaksanaan Pembayaran PPh dan BPHTB yang Dilakukan oleh Notaris	70
 BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK JUAL BELI TANAH.....	73
1. Tinjauan Yuridis Pidana Penggelapan	73

2. Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Terlibat dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah.....	85
2.1. Kasus Posisi	90
2.2. <i>Ratio Decidendi</i>	96
2.3. Putusan	98
2.4. Analisis Putusan	101
 BAB IV PENUTUP	 105
1. Kesimpulan.....	105
2. Saran	106
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Bahwa terkait kewenangan Notaris dalam menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara yakni kewenangannya tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara yakni bank persepsi yang ditunjuk yang harus dilaksanakan sebelum dilakukannya jual beli ataupun peralihan hak atas tanah.
2. Bahwa sanksi pidana terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana penggelapan pajak jual beli tanah, yakni terhadap notaris selaku PPAT yang bersangkutan perbuatannya telah terbukti memenuhi rumusan delik Pasal pidana dalam Pasal 372 KUHP. Adapun alasan pemberat yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam kasus ini yakni bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Notaris tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembayaran untuk proses penerbitan sertifikat, hal ini bertolak belakang dengan peranan seorang Notaris yang seharusnya ikut serta dalam melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak yang terutang pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan cara hanya boleh menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan bangunan jika pajaknya sudah dibayar.

2. Saran

1. Bagi para penghadap (penjual dan pembeli) dalam hal mempercayakan untuk membayarkan pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara kepada notaris, hendaknya memilih notaris yang amanah, sehingga uang pajak jual beli tanah tersebut tidak disalahgunakan. Sedangkan bagi notaris hendaknya dalam memberikan pelayanan kepada klien terkait pembayaran pajak jual beli tanah agar menjaga amanah yang dipercayakan oleh klien kepadanya.
2. Kepada para Notaris selaku PPAT hendaknya agar memegang teguh serta melaksanakan sumpah/janji jabatan yang diucapkan sebelum memulai tugas dan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab hukum kepada Negara Republik Indonesia dan juga para pihak, sehingga lebih mengutamakan kehati-hatian dan menerapkan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Dengan demikian notaris yang bersangkutan akan terhindar dari permasalahan pidana terkait pajak jual beli tanah.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Adami Chazawi, dkk, *Materi Hukum Pidana II, Kejahatan–Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta 2006.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi 1, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Agus Priono, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010)*, Tesis, pada Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Bachtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana untuk Tiap-tiap Orang*, Pradnya Paramitha, Bandung, 2007.
- Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.
- Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*, Media Notaris, Tangerang, 2005.
- E. Sumaryono, *Etika & Hukum*, Kanisius, Jakarta, 2002.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962.

- Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004.
- Fauzi Malik, “*Penerapan PPh Final dalam sistem self assesment ditinjau dari Asas Keadilan*”, Berita Pajak, Nomor 1506, 2004.
- Gatot S.M. Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer, Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan, Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2009.
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981.
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktik*, Edisi I, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Ni Wayan Novita Indah Pandansari, *Urgensi Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000.

P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung, 1991.

_____, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1997.

_____, *Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

_____, dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus (kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung, Tarsito, 1979.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas, Airlangga, Surabaya, 1998.

Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Cet.9, Jakarta, 1998.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Ridwan H.R. *Hukum Adimistrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN-UMI, Ujungpandang, 2008.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 2003.

Salim H.S., *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2000.

Than Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia, Jakarta, 1982.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, *Staatsblad* 1847 Nomor 23, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Wetboek van Strafrecht, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/Pid.B/2015/ PN.Dps. tertanggal 04 Agustus 2015.

Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.

